

ABSTRAK

Bening Nada Nurdini: “Implementasi Kebijakan Tentang Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Cirebon”

Barang milik daerah dalam kata lain juga disebut sebagai aset daerah merupakan sumberdaya yang sangat penting, salah satunya adalah aset tanah dan bangunan. Agar aset tanah dan bangunan yang dimiliki pemerintah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal juga demi kelancaran pengelolaan aset daerah pemerintah daerah harus memiliki bukti kepemilikan atas aset daerah atau barang daerah, bukti kepemilikan yang kuat berupa sertifikat seperti yang tercantum dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari total 803 aset tanah tersebut, Pemerintah Kota Cirebon baru mengantongi 320 sertifikat sedangkan sisanya aset tanah yang dimiliki oleh Kota Cirebon masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikat. Lambatnya kinerja pemerintah dalam proses inventarisasi yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya aset Kota Cirebon yang belum bersertifikat atau memiliki bukti kepemilikan atas aset tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Tentang Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Cirebon serta apa saja faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Cirebon.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, diposisi implementor.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Cirebon, kemudian di analisis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta teknik studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa proses Implementasi Kebijakan Tentang Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Cirebon belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor penghambatnya adalah adanya pengakuan dan gugatan dari pihak luar, dan faktor keterbatasan anggaran yang turun setiap tahun nya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan

ABSTRAC

Bening Nada Nurdini: “Implementation of Certification Policies on Cirebon City Government Land and Building Assets”

Regional property in other words also referred to as regional assets are very important resources, one of which is land and building assets. In order for land and building assets owned by the government to be managed and utilized optimally also for the smooth management of regional assets the regional government must have proof of ownership of regional assets or regional goods, strong proof of ownership in the form of certificates as listed in article 43 paragraph (1) and Paragraph (2) Government Regulation (PP) No. 27 of 2014 concerning Management of State / Regional Property. Of the total 803 land assets, the Cirebon City Government has just obtained 320 certificates while the remaining land assets owned by the City of Cirebon are still in the process of obtaining the certificates. The slow performance of the government in the inventory process carried out causes many Cirebon City assets that are not yet certified or have proof of ownership of these assets.

The purpose of this study was to determine the process of implementing of Certification Policies on Cirebon City Government Land and Building Assets and what are the factors inhibiting the Implementation of Certification Policies on Cirebon City Government Land and Building Assets.

The theory used in this study is the theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn which consists of standards and policy objectives, resources, relationships between organizations, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political conditions, disposition by the implementor.

This study uses a descriptive method that is to describe or explain how the Implementation of Certification Policies on Cirebon City Government Land and Building Assets, then analyzed. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques conducted by interview techniques and literature study techniques.

Based on the results of data analysis and discussion, the conclusion is that the process of implementing of Certification Policies on Cirebon City Government Land and Building Assets has not been running optimally. The inhibiting factors are the existence of recognition and lawsuits from outside parties, and the budget limitation factor that falls every year.

Keywords: Implementation of Policy, Land and Building Asset Certification